



NEWSLETTER PUSDATIN

Daftar Isi

- Data Akurat, Koordinasi Kuat, Kebijakan Tepat Bersama Memperkuat Fondasi Swasembada Pangan, Halaman 1
- Perkuat Publikasi Berbasis Data, Pusdatin Bangun Sinergi dengan PSEKP, Halaman 4
- Kementan Perkuat Kesiapan Evaluasi Pemerintah Digital 2026: Eviden Harus Tunjukkan Implementasi dan Dampak, Halaman 7
- Di Balik Layanan Digital Kementan: Pusdatin dan Itjen Bersama Menjaga Kualitas Aplikasi, Halaman 10
- Ketika Data Menjadi Fondasi Akuntabilitas, Halaman 11

Mohon Kesediaannya Untuk Mengisi Survei Kepuasan



<https://bit.ly/surveipusdatinkementan>

Data Akurat, Koordinasi Kuat, Kebijakan Tepat Bersama Memperkuat Fondasi Swasembada Pangan

Ketersediaan data pertanian yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung kebijakan pembangunan pertanian. Untuk memperkuat kualitas statistik padi nasional, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan koordinasi dan verifikasi data evidence Luas Tanam (LT) dan Luas Panen (LP) Padi, sekaligus membahas perkembangan luas panen dan produksi padi berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA).



Pusdatin berkoordinasi dengan BPS dalam rangka verifikasi dan rekonsiliasi data Luas Tanam dan Luas Panen Padi hasil evidence lapangan dengan hasil pengamatan Kerangka Sampel Area (KSA)

Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 23 Juli 2026 di Ruang Rapat 1A, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), Bogor. Rapat dipimpin Kepala Pusdatin Kementerian Pertanian, Dr. M. Luthful Hakim, SP., MSI, dan dihadiri perwakilan Direktorat Statistik Sumber Daya Hayati BPS serta jajaran Pusdatin.

Tim Redaksi

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Data dan
Sistem Informasi Pertanian

Redaktur

Kepala Bagian Umum

Editor

Roydatul Zikria, S.Si, MSE
Dr. Nugroho Setyabudhi, S.kom, MM
Ir. Wieta Barkah Komalasari, M.Si
Suyati, S.Kom

Fotografer

Sri Lestari, SE
Iswadi

Desain Grafis

Dhanang Susatyo, SE
Muchammad Eko Darwanto, ST

Sekretariat

Apriadi Setiawan, S.Kom, MT
Rizky Purnama R, S.Kom
Didik Pratama Saputra, S.Kom
Rahma Andany, S.Kom
Yusri Ardi, S.Kom
Marwati
Priatna Sari

Alamat Redaksi



**PUSAT DATA DAN
SISTEM INFORMASI PERTANIAN**
Jl. Harsono RM No. 3 Gd D Lantai IV,
Ragunan - Jakarta 12550
Telp : 021- 7822638
e-mail : layanan.data@pertanian.go.id

Dalam kegiatan tersebut, Pusdatin menyampaikan perkembangan pengumpulan evidence LT dan LP padi yang dihimpun melalui aplikasi berbasis web Survey123. Aplikasi ini digunakan oleh Penanggung Jawab (PJ) dan Penyuluh Pertanian sebagai sarana pelaporan kondisi lapangan, antara lain lokasi pengamatan, dokumentasi foto, koordinat geografis, waktu pengamatan, luas tanam, luas panen, serta informasi pendukung lainnya.

Evidence lapangan tersebut selanjutnya diverifikasi dan dibandingkan dengan hasil pengamatan KSA BPS. Proses ini menjadi penting karena data yang berasal dari lapangan dapat memberikan informasi pendukung mengenai kondisi aktual pertanaman padi di berbagai wilayah.



Pembahasan hasil evidence lapangan serta sinkronisasi data dengan hasil pengamatan Kerangka Sampel Area (KSA)

Kepala Pusdatin menegaskan bahwa sinkronisasi data LT dan LP merupakan salah satu tahapan penting dalam menghasilkan statistik pertanian yang berkualitas. Data administrasi yang dihimpun Kementerian Pertanian melalui jaringan penyuluh di seluruh Indonesia memiliki peran strategis sebagai evidence lapangan untuk memperkuat proses validasi hasil pengamatan KSA BPS.

Lebih lanjut, proses rekonsiliasi dilakukan bukan untuk mengubah metodologi statistik resmi, melainkan untuk memastikan bahwa informasi lapangan yang valid dapat menjadi bahan evaluasi bersama. Dengan demikian, data yang dihasilkan diharapkan semakin mampu menggambarkan kondisi riil pertanaman padi di lapangan.

Salah satu fokus pembahasan adalah melakukan sandingan antara data LTT dan fase Vegetatif-1 (V1) KSA padi tahun 2025–2026. Hasil pembahasan menunjukkan adanya dinamika pertanaman padi selama tahun berjalan. Pada Juni 2026, LTT tercatat mencapai sekitar 1,102 juta hektare, meningkat sekitar 11.980 hektare dibandingkan Juni 2025 yang mencapai sekitar 1,090 juta hektare. Namun, pada April dan Mei terjadi penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perbedaan antara LTT dan V1 KSA juga menjadi perhatian. Pada April terdapat selisih sekitar 297.050 hektare, sedangkan pada Mei selisihnya sekitar 45.947 hektare. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh perbedaan waktu pencatatan, keterlambatan pelaporan dari daerah, perubahan fase pertumbuhan tanaman, perbedaan cakupan wilayah, maupun kondisi iklim yang menyebabkan pergeseran jadwal tanam.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa interpretasi data pertanian perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sumber data. Karena itu, proses verifikasi dan rekonsiliasi menjadi bagian penting untuk memahami penyebab perbedaan sekaligus meningkatkan kualitas data.

Pembahasan juga mencakup perkembangan luas panen padi berdasarkan KSA. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa luas panen pada Juni 2026 secara sementara diperkirakan mencapai sekitar 0,84 juta hektare, atau meningkat sekitar 6,95 persen dibandingkan Juni tahun sebelumnya. Secara kumulatif, luas panen Januari–Juni 2026 diperkirakan mencapai sekitar 6,31 juta hektare, meningkat sekitar 0,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai sekitar 6,26 juta hektare.

Capaian tersebut memberikan gambaran positif pada semester pertama 2026. Namun, perkembangan pada semester kedua tetap perlu mendapatkan perhatian. Hasil KSA menunjukkan bahwa potensi luas panen periode Juli–September 2026 diperkirakan sekitar 2,96

juta hektare, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai sekitar 3,19 juta hektare atau turun sekitar 7 persen.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya monitoring pertanaman secara berkelanjutan. Informasi mengenai fase pertumbuhan tanaman, perkembangan tanam, dan potensi panen perlu terus diperbarui agar proyeksi produksi padi dapat disusun secara lebih akurat dan tepat waktu.

Selain membahas angka dan hasil sandingan data, pertemuan juga memberikan perhatian terhadap kualitas evidence yang dikumpulkan oleh penyuluh dan PJ di daerah. Beberapa aspek yang perlu terus diperkuat meliputi kelengkapan dokumentasi, akurasi koordinat lokasi, ketepatan waktu pelaporan, serta konsistensi luas lahan yang dilaporkan dengan kondisi lapangan. Identifikasi terhadap keterlambatan maupun potensi duplikasi data juga menjadi bagian dari proses validasi.

Penguatan validasi tidak hanya dilakukan pada tingkat pusat. Koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota serta BPS daerah diperlukan untuk memperoleh klarifikasi terhadap wilayah yang menunjukkan perbedaan data cukup besar. Mekanisme verifikasi secara berjenjang diharapkan dapat meningkatkan kualitas data sebelum digunakan dalam proses rekonsiliasi.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian penting dalam pengembangan sistem monitoring. Dalam tindak lanjut rapat, Pusdatin diarahkan untuk terus mengembangkan monitoring berbasis data spasial dan citra satelit sebagai salah satu pendukung validasi perkembangan pertanaman secara lebih cepat dan akurat.

Kegiatan rekonsiliasi LT dan LP padi tidak semata-mata menjadi agenda teknis pengolahan data. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem statistik pertanian yang semakin terintegrasi antara data operasional Kementerian Pertanian dan statistik resmi BPS.

Data yang berkualitas dibutuhkan untuk berbagai kepentingan, mulai dari pemantauan produksi, penyusunan proyeksi, evaluasi program, hingga perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Karena itu, konsistensi, transparansi, dan keterlacakan data menjadi aspek yang perlu terus dijaga.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan antara data laporan penyuluh dan estimasi KSA pada beberapa bulan, secara umum kedua sumber data memiliki pola perkembangan yang sejalan. Selisih terbesar tercatat pada Februari dan Juni 2026, sementara kesesuaian terbaik terlihat pada Mei dengan selisih sekitar 66.834 hektare.

Kondisi tersebut menjadi dasar untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap wilayah yang memiliki selisih besar, termasuk mengidentifikasi apakah perbedaan disebabkan oleh aspek teknis pelaporan, perbedaan waktu pencatatan, atau kondisi pertanaman di lapangan.

Penguatan kualitas data pertanian pada akhirnya memiliki keterkaitan erat dengan agenda pembangunan pertanian nasional. Statistik luas tanam, luas panen, dan produksi padi menjadi salah satu informasi penting dalam memantau kinerja sektor tanaman pangan serta mendukung perencanaan program. Karena itu, sinergi antara Pusdatin Kementerian Pertanian, BPS, pemerintah daerah, dan penyuluh pertanian perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kolaborasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan angka statistik yang lebih akurat, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang tersedia dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan secara tepat sasaran.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa luas panen padi Januari–Juni 2026 mencapai sekitar 6,31 juta hektare, meningkat 0,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Sementara itu, potensi luas panen Juli–September 2026 diperkirakan mengalami penurunan sekitar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi sinyal penting untuk memperkuat pengawalan pertanaman dan produksi pada

semester kedua.

Ke depan, monitoring potensi luas panen, peningkatan kualitas evidence lapangan, sinkronisasi periode pencatatan, serta penguatan pemanfaatan teknologi spasial menjadi langkah penting yang perlu terus dilakukan.

Dengan data yang semakin akurat dan terintegrasi, proses perencanaan pembangunan pertanian dapat dilakukan secara lebih responsif. Pada akhirnya, penguatan statistik pertanian bukan hanya tentang menghasilkan angka, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dasar informasi yang kuat untuk mendukung ketahanan pangan dan pencapaian swasembada pangan nasional.

Penulis: Suyati

Perkuat Publikasi Berbasis Data, Pusdatin Bangun Sinergi dengan PSEKP

Upaya memperkuat kualitas informasi pertanian terus dilakukan melalui kolaborasi antarsatuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Salah satunya melalui kegiatan koordinasi dan evaluasi penyusunan analisis serta publikasi sektor pertanian yang dilaksanakan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) ke Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), Bogor, pada 28 Juli 2026.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pusdatin sebagai penyedia dan pengelola data statistik pertanian dengan PSEKP yang memiliki pengalaman dalam penelitian sosial ekonomi, analisis kebijakan, serta pengembangan berbagai publikasi ilmiah di bidang pertanian. Sinergi kedua fungsi tersebut diharapkan dapat menghasilkan informasi yang tidak hanya akurat secara statistik, tetapi juga mampu memberikan konteks, penjelasan, dan rekomendasi yang relevan bagi pengambilan kebijakan.

Tim Pusdatin yang melaksanakan kegiatan terdiri atas Ir. Wieta Barkah K., M.Si, Suyati, S.Kom., Iswadi, dan Sri Lestari, S.Kom.



Pembahasan hasil evidence lapangan serta sinkronisasi data dengan hasil pengamatan Kerangka Sampel Area (KSA)

Koordinasi diawali dengan pertemuan bersama Kepala Bagian Umum PSEKP, Eko Nugroho, S.Kom., M.M. Dalam pertemuan tersebut disampaikan apresiasi terhadap inisiatif Pusdatin dalam membangun sinergi untuk meningkatkan kualitas analisis dan publikasi sektor pertanian.

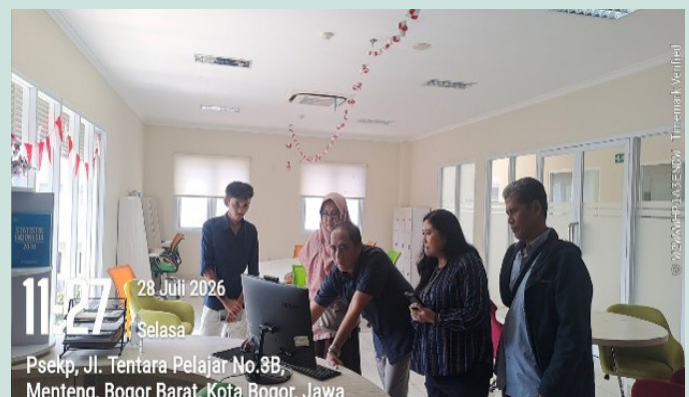
Di tengah kebutuhan terhadap data dan informasi yang semakin cepat, akurat, dan terpercaya, kolaborasi antarsatuan kerja menjadi semakin penting. Publikasi pertanian tidak cukup hanya menyajikan angka, tetapi juga perlu memberikan pemahaman mengenai kondisi yang terjadi, faktor yang memengaruhinya, dampaknya terhadap masyarakat, serta alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Pembahasan mencakup perkembangan berbagai publikasi yang dihasilkan PSEKP, mulai dari laporan penelitian, policy brief, policy paper, jurnal ilmiah, prosiding, hingga publikasi digital. Salah satu tantangan yang mengemuka adalah bagaimana meningkatkan aksesibilitas informasi agar hasil penelitian tidak berhenti sebagai dokumen ilmiah, tetapi dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku usaha, penyuluh pertanian, maupun masyarakat.

Dalam konteks tersebut, keterpaduan antara data statistik Pusdatin dan hasil kajian PSEKP menjadi sangat strategis. Data statistik memberikan landasan kuantitatif dalam menggambarkan kondisi sektor pertanian, sementara hasil penelitian dan analisis sosial

ekonomi dapat membantu menjelaskan fenomena di balik angka tersebut. Integrasi keduanya akan menghasilkan publikasi yang lebih utuh dan informatif.

Pusdatin juga menyampaikan potensi pemanfaatan berbagai sumber data sektoral pertanian yang tersedia, antara lain data tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, mekanisasi pertanian, hingga data spasial. Beragam sumber data tersebut dapat menjadi bahan untuk memperkaya analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Namun, pemanfaatannya perlu didukung mekanisme pertukaran data yang lebih terstruktur. Setiap data yang digunakan dalam publikasi perlu memiliki sumber yang jelas, telah melalui proses verifikasi, serta dilengkapi metadata yang memadai.

Ketersediaan metadata menjadi penting karena membantu pengguna memahami definisi, cakupan, periode, satuan, sumber, serta karakteristik data yang digunakan. Dengan demikian, pemanfaatan data dalam analisis maupun publikasi dapat dilakukan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.



Dari kiri ke kanan: Kurnia Wibowo, Wieta Barkah K, Edi Ahmad Saubari, Suyati, dan Iswadi

Selain melakukan koordinasi terkait analisis dan publikasi, tim Pusdatin juga mengunjungi Perpustakaan PSEKP. Kunjungan diterima oleh Sheila Savitri, S.Sos., M.A.P., selaku Koordinator Kegiatan Pengelola Perpustakaan PSEKP, Edi Ahmad Saubari, A.Md., sebagai pengelola perpustakaan digital, serta Kurnia Wibowo, S.IP., pustakawan Perpustakaan PSEKP. Dalam kunjungan tersebut, tim memperoleh gambaran mengenai pengelolaan

perpustakaan sebagai pusat informasi ilmiah yang mendukung kegiatan penelitian, analisis kebijakan, dan pengembangan pengetahuan di bidang sosial ekonomi pertanian.

Menariknya, pengelolaan perpustakaan tidak hanya berfokus pada koleksi tercetak. PSEKP juga mengembangkan layanan digital untuk memperluas akses informasi. Pengelolaan koleksi mencakup pengadaan, pengolahan, klasifikasi, katalogisasi, preservasi, hingga digitalisasi bahan pustaka. Hasil penelitian, laporan teknis, dan berbagai publikasi ilmiah juga dikembangkan dalam bentuk repositori digital yang dapat diakses secara daring.

Layanan yang tersedia cukup beragam, mulai dari sirkulasi buku, referensi dan penelusuran literatur, akses jurnal nasional dan internasional, e-Library, repositori hasil penelitian, konsultasi informasi ilmiah, penelusuran data sosial ekonomi pertanian, hingga pendampingan penyusunan sitasi dan referensi ilmiah.

Sementara itu, publikasi yang dikelola dan didukung oleh perpustakaan meliputi buku hasil penelitian, laporan penelitian, policy brief, policy paper, working paper, prosiding, monograf, jurnal ilmiah, buletin dan newsletter, infografis hasil kajian, statistik sosial ekonomi pertanian, hingga publikasi digital berbasis *open access*.

Diskusi kemudian berkembang pada penguatan perpustakaan digital. PSEKP menjelaskan bahwa pengembangan layanan digital diarahkan pada kemudahan akses informasi, integrasi metadata koleksi, digitalisasi arsip lama, serta peningkatan interoperabilitas dengan repositori nasional dan internasional. Sejalan dengan hal tersebut, Pusdatin menyampaikan pentingnya penguatan metadata dan penerapan standar interoperabilitas. Integrasi dengan portal data pertanian juga dinilai dapat meningkatkan nilai guna koleksi digital sehingga informasi statistik dan hasil kajian dapat ditemukan dan dimanfaatkan dengan lebih mudah oleh pengguna.

Pusdatin memberikan sejumlah masukan untuk mendukung pengembangan layanan informasi

dan publikasi, antara lain integrasi metadata perpustakaan dengan portal data dan publikasi Kementerian Pertanian, pengembangan dashboard untuk memantau penggunaan koleksi digital, penguatan standar metadata nasional dan internasional, serta percepatan digitalisasi koleksi lama yang memiliki nilai historis bagi pembangunan pertanian Indonesia.

Tidak kalah penting, publikasi juga perlu dikemas dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Infografis, video singkat, dan ringkasan eksekutif dapat menjadi alternatif untuk menjembatani informasi ilmiah dengan kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) juga menjadi salah satu peluang pengembangan, khususnya untuk membantu penelusuran informasi, memberikan rekomendasi literatur, dan mempercepat pencarian dokumen.

Koordinasi Pusdatin dan PSEKP menunjukkan bahwa penguatan ekosistem informasi pertanian tidak dapat dilakukan oleh satu unit kerja saja. Data statistik, hasil penelitian, analisis kebijakan, publikasi, dan pengelolaan pengetahuan perlu saling terhubung agar memberikan manfaat yang lebih besar. Integrasi antara statistik resmi, penelitian sosial ekonomi, dan analisis kebijakan akan menghasilkan publikasi yang lebih komprehensif, informatif, dan relevan untuk mendukung perencanaan, monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan di sektor pertanian.

Di sisi lain, praktik pengelolaan perpustakaan modern yang mengedepankan digitalisasi, interoperabilitas metadata, repositori institusi, dan layanan informasi berbasis teknologi memberikan referensi penting bagi pengembangan layanan informasi dan publikasi berbasis data di lingkungan Kementerian Pertanian.

Ke depan, sinergi Pusdatin dan PSEKP diharapkan tidak hanya menghasilkan publikasi yang semakin berkualitas, tetapi juga membangun ekosistem data, analisis,

dan pengetahuan yang terintegrasi. Dengan demikian, informasi pertanian dapat hadir secara lebih mudah diakses, mudah dipahami, dan semakin relevan bagi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, penyuluh, maupun masyarakat.

Data yang akurat adalah fondasi. Analisis memberikan makna. Publikasi menjadi jembatan agar pengetahuan tersebut dapat memberi manfaat bagi pembangunan pertanian.

Penulis: Suyati

Kementan Perkuat Kesiapan Evaluasi Pemerintah Digital 2026: Eviden Harus Tunjukkan Implementasi dan Dampak

Transformasi digital pemerintahan kini tidak lagi cukup diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun atau dokumen kebijakan yang dihasilkan. Manfaat yang dirasakan pengguna, keterpaduan layanan, keamanan, hingga kualitas pelayanan justru menjadi bagian penting untuk menunjukkan sejauh mana transformasi digital benar-benar berjalan.

Semangat inilah yang menjadi perhatian dalam kegiatan *Reviu Bukti Dukung Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) Kementerian Pertanian Tahun 2026* yang digelar Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin), Rabu (5/8/2026), di Ruang Rapat A Pusdatin.

Kegiatan dibuka oleh Teuku Ardhianzah Dewantara Silang, Ketua Kelompok Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi Pusdatin, mewakili Kepala Pusdatin. Pertemuan melibatkan berbagai unit kerja Kementerian Pertanian, mulai dari Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pertanian, Biro Perencanaan, hingga sejumlah pusat dan tim kerja di lingkungan Pusdatin.

Pusdatin juga menghadirkan dua narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian

PANRB), Aldien Asy Syairozi dan M. Ravi Khan, untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai indikator, instrumen, serta bukti dukung yang diperlukan dalam *Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital 2026*.



Reviu Bukti Dukung Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) Kementerian Pertanian Tahun 2026 yang digelar Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin), Rabu (5/8/2026).

Dalam arahannya, Ardhianzah menekankan bahwa kesiapan menghadapi evaluasi membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi lintas unit kerja. Pemerintah Digital tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan unit pengelola teknologi informasi semata, melainkan bagian dari transformasi tata kelola organisasi secara keseluruhan.

“Evaluasi Pemerintah Digital menjadi momentum bagi kita untuk melihat kembali apakah transformasi digital yang telah dilakukan benar-benar berjalan dan memberikan manfaat. Karena itu, eviden yang kita siapkan tidak cukup hanya lengkap secara administratif, tetapi harus mampu menunjukkan implementasi dan dampaknya”, ujar Ardhianzah.

Pesan tersebut sekaligus menjadi benang merah pembahasan. Dokumen tetap penting, tetapi keberadaan dokumen saja belum cukup. Eviden yang disampaikan harus mampu menceritakan apa yang telah dilaksanakan, bagaimana teknologi dimanfaatkan, serta perubahan atau manfaat apa yang dihasilkan bagi organisasi dan pengguna layanan.

Salah satu hal yang mengemuka dalam *reviu* adalah perubahan cara pandang terhadap evaluasi transformasi digital pemerintah. Evaluasi Pemdi semakin menempatkan hasil dan dampak atau *outcome* dan *impact* sebagai

bagian penting dalam melihat keberhasilan penerapan Pemerintah Digital. Dengan kata lain, sebuah instansi tidak cukup menunjukkan bahwa kebijakan telah diterbitkan, tim telah dibentuk, atau aplikasi telah tersedia. Yang juga perlu terlihat adalah bagaimana semua itu diterapkan dan memberikan manfaat nyata.

Aldien menjelaskan bahwa berbagai dokumen dan hasil evaluasi yang sebelumnya telah dimiliki Kementerian Pertanian tetap dapat dimanfaatkan. Dokumen lama yang masih relevan tidak harus ditinggalkan, melainkan dapat dipetakan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan indikator Pemdi.

“Yang perlu diperhatikan bukan hanya apakah sebuah dokumen tersedia, tetapi apakah eviden tersebut dapat menggambarkan pelaksanaan yang sebenarnya. Dokumen, sistem, maupun hasil evaluasi sebelumnya dapat dimanfaatkan sepanjang masih relevan dan dapat menunjukkan keterkaitannya dengan indikator yang dinilai”, jelas Aldien.

Pendekatan ini memberi ruang bagi Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan berbagai dokumen yang sudah tersedia. Pada aspek perencanaan, misalnya, Rencana Strategis Kementerian Pertanian dapat digunakan sebagai eviden awal sembari menunggu penyelesaian Rencana Aksi Nasional. Eviden yang tersedia saat ini dinilai dapat mendukung pencapaian level awal, kemudian diperkuat setelah dokumen Rencana Aksi Nasional selesai disusun.

Pada aspek manajemen, instrumen manajemen risiko yang telah dimiliki juga dapat dikonversikan menjadi kertas kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan evaluasi. Dokumen manajemen risiko Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat dilampirkan untuk memperlihatkan bahwa pengelolaan risiko telah diterapkan di dalam organisasi.

Perhatian serupa diberikan pada kompetensi sumber daya manusia. Peta kompetensi yang berasal dari BKN dapat dimanfaatkan setelah dilakukan konfirmasi kembali terhadap kesesuaian data dan cakupan kompetensinya.

Sementara itu, penggunaan aplikasi e-Personal dapat menjadi bukti penerapan layanan kepegawaian digital dan diperkuat dengan dokumentasi penggunaannya. Bahkan aktivitas yang sehari-hari terlihat sederhana, seperti komunitas belajar dan kegiatan sharing knowledge, dapat menjadi eviden apabila mampu menunjukkan adanya proses berbagi pengetahuan. Keikutsertaan pegawai dalam forum internasional juga dapat dimanfaatkan untuk memperlihatkan pengembangan kompetensi dan jejaring pengetahuan.

Dari sisi kelembagaan, Kementerian Pertanian telah memiliki SK Tim SPBE yang dapat digunakan sebagai eviden pendukung. Sementara SK Tim Pemerintah Digital masih dalam proses pengesahan dan perlu dipercepat penyelesaiannya untuk semakin memperkuat aspek kelembagaan dan kolaborasi Pemerintah Digital.

Perubahan orientasi dari sekadar dokumen menuju dampak semakin terlihat ketika pembahasan masuk pada layanan digital. Kementerian Pertanian perlu melakukan inventarisasi terhadap seluruh layanan digital yang telah tersedia dan digunakan. Inventarisasi tersebut tidak berhenti pada nama aplikasi atau layanan. Informasi mengenai siapa penggunanya, bagaimana tingkat pemanfaatannya, integrasinya dengan layanan lain, hingga manfaat yang diberikan perlu ikut dipetakan.

Ravi menekankan pentingnya melihat layanan digital dari sudut pandang pengguna. Keberhasilan transformasi digital pada akhirnya akan terasa ketika layanan pemerintah menjadi lebih mudah diakses, digunakan, dan benar-benar membantu masyarakat maupun pengguna internal.

“Pada akhirnya yang ingin dilihat adalah manfaat dari layanan digital tersebut. Kita perlu dapat menunjukkan siapa penggunanya, bagaimana layanan dimanfaatkan, bagaimana kualitasnya dipantau, dan sejauh mana layanan itu memberikan kemudahan kepada pengguna”, ungkap Ravi.

Karena itu, dashboard pemantauan layanan menjadi salah satu eviden penting. Dashboard tidak hanya memperlihatkan keberadaan layanan, tetapi dapat membantu menunjukkan bagaimana kualitas dan kinerja layanan dipantau secara berkelanjutan. Data mengenai jumlah keseluruhan layanan digital juga perlu disiapkan, sementara penerapan *Service Level Agreement* nasional menjadi salah satu agenda pengembangan ke depan.

Perspektif pengguna bahkan diperluas hingga menyentuh kebutuhan kelompok rentan. Dalam pembahasan disampaikan adanya rencana pelaksanaan *mystery guest* oleh Kementerian PANRB sebagai salah satu pendekatan untuk melihat pengalaman pengguna secara langsung. Hal ini membuat aspek aksesibilitas menjadi semakin penting. Layanan digital pemerintah perlu dapat menunjukkan bagaimana kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan atau kebutuhan khusus ikut diperhatikan dalam desain dan pelayanannya.

Transformasi digital yang semakin luas juga harus berjalan beriringan dengan keamanan. Karena itu, aspek keamanan siber dan perlindungan infrastruktur menjadi bagian penting dalam Evaluasi Pemerintah Digital. Untuk indikator yang berkaitan dengan IKASANDI (Instrumen Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi), dokumen hasil penilaian atau laporan yang telah tersedia dapat digunakan sebagai eviden. Sementara pada aspek Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV), laporan pelaksanaan IIV tahun 2025 yang telah disampaikan kepada Badan Siber dan Sandi Negara dapat digunakan untuk memperlihatkan pelaksanaan pelindungan infrastruktur sesuai ketentuan.

Laporan penanganan insiden keamanan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik organisasi. Eviden yang disampaikan diharapkan mampu menggambarkan tidak hanya bahwa sebuah insiden pernah ditangani, tetapi juga mekanisme, proses, dan tindak lanjut penanganannya di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pada aspek infrastruktur, pembahasan turut menyoroti pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP). Pemanfaatan keduanya dapat menjadi bagian dari eviden untuk menunjukkan konsolidasi serta integrasi perencanaan infrastruktur digital pemerintah. Dokumentasi pemanfaatannya karena itu perlu disiapkan secara memadai.

Hasil reviu menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian pada dasarnya tidak memulai persiapan dari nol. Berbagai dokumen, sistem, hasil evaluasi, hingga praktik implementasi yang sudah berjalan dapat digunakan sebagai eviden Evaluasi Pemerintah Digital 2026.

Dokumen tahun 2025 yang masih relevan juga dapat dimanfaatkan. Demikian pula nilai dari hasil evaluasi sebelumnya dapat dikonversikan untuk indikator tertentu sesuai dengan mekanisme penilaian Pemdi.

Meski demikian, masih ada pekerjaan yang perlu diselesaikan. Beberapa dokumen strategis masih dalam proses, antara lain Rencana Aksi Nasional, SK Tim Pemerintah Digital, serta sejumlah eviden pada indikator arsitektur Pemerintah Digital. Yang tidak kalah penting, setiap eviden perlu diperkuat agar mampu menunjukkan implementasi nyata, keterpaduan layanan, pemanfaatan teknologi, dan dampaknya bagi organisasi maupun pengguna.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertanian akan melakukan inventarisasi seluruh eviden berdasarkan indikator Pemdi, memetakan dokumen lama termasuk dokumen tahun 2025, melakukan konversi nilai evaluasi sebelumnya, serta mempercepat penyelesaian dan pengesahan SK Tim Pemerintah Digital. Langkah berikutnya mencakup konfirmasi data kompetensi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), penyiapan dokumentasi penggunaan aplikasi, inventarisasi seluruh layanan digital beserta data pemanfaatannya, penyiapan dashboard pemantauan layanan, pengumpulan laporan tahun sebelumnya yang masih relevan, hingga penyediaan dokumentasi layanan bagi kelompok rentan.

Kolaborasi antarsatuan kerja menjadi kunci agar seluruh eviden tersebut tidak berdiri sendiri. Dokumen kebijakan harus dapat terhubung dengan implementasinya, aplikasi dengan pengguna dan manfaatnya, serta infrastruktur digital dengan kualitas dan keamanan layanan yang dihasilkan.

Melalui kegiatan reviu bersama Kementerian PANRB ini, Evaluasi Pemerintah Digital 2026 diharapkan tidak hanya menjadi agenda penilaian tahunan. Lebih dari itu, evaluasi dapat menjadi kesempatan bagi Kementerian Pertanian untuk melihat kembali perjalanan transformasi digitalnya: apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih perlu diperkuat, dan manfaat apa yang benar-benar telah dirasakan oleh pengguna.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Pemerintah Digital bukanlah seberapa banyak aplikasi yang dibangun atau seberapa tebal dokumen yang berhasil dikumpulkan. Ukurannya adalah seberapa jauh teknologi mampu membuat tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif serta menghadirkan layanan yang terintegrasi, aman, inklusif, mudah digunakan, dan memberikan manfaat nyata bagi penggunanya.

Penulis: Nugroho Setyabudhi

Di Balik Layanan Digital Kementan: Pusdatin dan Itjen Bersama Menjaga Kualitas Aplikasi

Transformasi digital di lingkungan Kementerian Pertanian terus berkembang seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintahan. Di balik berbagai aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis Kementerian Pertanian, terdapat upaya berkelanjutan untuk memastikan layanan digital dapat berjalan secara baik, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) yang melibatkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian.



Proses Audit TIK SIPEDAS – Direktorat Jenderal Hortikultura

Pada pelaksanaannya, kegiatan audit TIK dilakukan terhadap sejumlah aplikasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang mendukung berbagai kebutuhan dan layanan di bidang pertanian. Beberapa aplikasi yang menjadi objek audit antara lain SIJITU pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, SIPEDAS pada Direktorat Jenderal Hortikultura, APPLY PVT pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), serta BABEBUN pada Direktorat Jenderal Perkebunan.

Kegiatan ini tidak semata-mata ditujukan untuk melihat apakah suatu aplikasi dapat digunakan. Lebih dari itu, audit TIK menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara tertib serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital yang berkualitas.

Bagi Pusdatin, keterlibatan dalam kegiatan ini merupakan bagian dari peran dalam mendukung tata kelola teknologi informasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Sementara itu, keterlibatan Itjen memberikan perspektif pengawasan yang penting dalam mendorong perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan TIK.

Kolaborasi antara fungsi teknis dan fungsi pengawasan tersebut menjadi salah satu bentuk sinergi dalam membangun layanan digital yang

semakin andal. Hasil dari proses audit dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi unit pengelola aplikasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, kualitas layanan digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan. Pengelolaan yang baik, kepatuhan terhadap ketentuan, keamanan, serta evaluasi secara berkala juga menjadi bagian penting dalam memastikan teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi organisasi.

Melalui sinergi Pusdatin dan Itjen, upaya menjaga kualitas aplikasi di lingkungan Kementerian Pertanian diharapkan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga transformasi digital tidak berhenti pada pembangunan aplikasi, tetapi juga memastikan aplikasi tersebut tetap memberikan dukungan optimal bagi pelaksanaan tugas dan layanan Kementerian Pertanian.

Penulis : Lilik W.

Ketika Data Menjadi Fondasi Akuntabilitas

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, data bukan sekadar kumpulan angka dan informasi. Data yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, evaluasi, hingga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai unit yang memiliki peran dalam pengelolaan data dan sistem informasi pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) terus mendukung ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk berbagai kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Salah satu bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui penyediaan data dan informasi dalam rangka mendukung kebutuhan pengawasan oleh lembaga yang berwenang. Dalam pelaksanaannya, Pusdatin berkoordinasi

dengan unit kerja terkait untuk memastikan data yang dibutuhkan dapat tersedia dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan data tidak hanya berkaitan dengan bagaimana data dikumpulkan dan disimpan, tetapi juga bagaimana data dapat ditemukan, dipahami, digunakan, dan dipertanggungjawabkan ketika dibutuhkan. Dalam konteks pengawasan, kualitas data menjadi hal yang sangat penting. Data yang tersedia perlu memiliki sumber yang jelas, konsisten, serta dapat ditelusuri sehingga dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai kondisi dan pelaksanaan program di bidang pertanian.

Peran Pusdatin dalam mendukung kebutuhan data juga tidak terlepas dari sinergi dengan unit kerja pengampu data. Sebagian besar data pertanian berasal dari unit-unit teknis yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menghasilkan serta mengelola data sesuai bidangnya masing-masing. Pusdatin berperan dalam mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data tersebut agar dapat digunakan secara optimal untuk berbagai kebutuhan.

Kolaborasi antara Pusdatin, unit pengampu data, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola data yang semakin baik. Dengan koordinasi yang berjalan dengan baik, kebutuhan informasi dapat dipenuhi secara lebih terstruktur, sekaligus menjaga kualitas dan keamanan data yang disampaikan.

Lebih jauh, dukungan terhadap kebutuhan data untuk pengawasan merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Data yang dikelola dengan baik pada akhirnya bukan hanya bermanfaat bagi satu kegiatan atau satu unit kerja, tetapi menjadi aset yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Bagi Pusdatin, pengelolaan data berarti memastikan bahwa data pertanian dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Kementerian Pertanian. Karena pada akhirnya, data yang berkualitas bukan hanya tentang memiliki informasi, tetapi tentang memastikan informasi tersebut dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

Penulis: Lilik W.



satudata.pertanian.go.id

